

Analisis Perilaku Pengemis Agresif di Lampu Merah Kota Pekanbaru dan Implikasi pada Ketertiban Umum

Azzila Fernelia¹ Febi Rahman Syafira² Hambali³ Hapidatul Zakiyah Rizky⁴ Dinda Sarmita Harahap⁵ Tabitha Freya Kalila Eugenia⁶ Wellya Putri⁷ Wilanda Zahra⁸ Zulfikar⁹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: azzila.fernelia2410@student.unri.ac.id¹ febi.rahan3203@student.unri.ac.id² hambali@lecturer.unri.ac.id³ hafidatul.zakiah6711@student.unri.ac.id⁴ rizky.dinda@lecturer.unri.ac.id⁵ tabitha.freya3214@student.unri.ac.id⁶ wellya.putri0516@student.unri.ac.id⁷ wilanda.zahra1521@student.unri.ac.id⁸ zulfikar0521@student.unri.ac.id⁹

Abstract

Behavior of beggars at traffic lights reflects social and economic inequality in urban areas, driven by poverty, unemployment, urbanization, and limited access to education and employment. This begging activity not only serves as a source of livelihood but also disrupts traffic order, poses safety risks, and inconveniences road users. Furthermore, the presence of beggars influences public perception of public space and creates a dilemma between law enforcement and social empathy. The government and the community need to work together through humane social policies and law enforcement to address the problem of begging while maintaining order. This approach must prioritize development and empowerment programs to help beggars escape poverty and reduce negative social impacts on urban environments. Therefore, addressing this phenomenon is crucial for maintaining the security and well-being of urban communities.

Keywords: Social Behavior, Beggars

Abstrak

Perilaku pengemis di lampu merah mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan yang dipicu oleh kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, serta keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Aktivitas mengemis ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menimbulkan gangguan ketertiban lalu lintas, risiko keselamatan, dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, keberadaan pengemis memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ruang publik dan menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan rasa empati sosial. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi melalui kebijakan sosial dan penegakan hukum yang manusiawi untuk mengatasi masalah pengemis sambil menjaga ketertiban. Pendekatan ini harus mengedepankan program pembinaan dan pemberdayaan agar pengemis dapat keluar dari kemiskinan dan mengurangi dampak sosial yang negatif di lingkungan perkotaan. Dengan demikian, penanganan fenomena ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat kota

Kata Kunci: Perilaku Sosial, Pengemis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan jumlah penduduk. Perkembangan tersebut menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan Sumatera bagian tengah. Pertumbuhan kota yang pesat ini membawa konsekuensi terhadap dinamika kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk munculnya berbagai permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif dari pemerintah daerah maupun pemangku

kepentingan terkait. Salah satu permasalahan sosial yang muncul seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru adalah keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik, khususnya di persimpangan lampu merah. Fenomena ini bukan merupakan hal yang baru dalam konteks perkotaan di Indonesia, namun karakteristik dan pola perilaku yang ditunjukkan oleh para pengemis di Kota Pekanbaru memiliki kekhasan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam. Keberadaan pengemis di lampu merah telah menjadi pemandangan yang umum dijumpai di berbagai titik strategis kota, seperti di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Lampu Merah SKA, Jalan Nangka, dan persimpangan-persimpangan lainnya yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi.

Permasalahan pengemis di perkotaan tidak dapat dipisahkan dari isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong seseorang untuk memilih jalan hidup sebagai pengemis. Dalam perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jeratan kemiskinan, seperti keterbatasan keterampilan, pendidikan yang rendah, serta minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Sementara dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, ditandai dengan keterbatasan peluang dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Fenomena pengemis di lampu merah Kota Pekanbaru memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk pengemisan tradisional. Para pengemis tidak hanya sekadar meminta sedekah dengan cara yang pasif, melainkan sebagian dari mereka menunjukkan perilaku agresif dalam melakukan aktivitasnya. Perilaku agresif tersebut dapat berupa tindakan mengetuk kaca mobil secara berulang-ulang, mendekati kendaraan dengan cara yang mengintimidasi, menghalangi kendaraan yang hendak bergerak, hingga menunjukkan ekspresi tidak senang ketika tidak diberikan uang. Pola perilaku semacam ini menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Keberadaan pengemis agresif di lampu merah menimbulkan dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Dari aspek ketertiban lalu lintas, aktivitas pengemis di persimpangan dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dari aspek psikologis, pengguna jalan yang mengalami intimidasi dari pengemis agresif dapat merasakan ketidaknyamanan hingga ketakutan. Dari aspek citra kota, keberadaan pengemis di ruang publik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap kondisi Kota Pekanbaru. Kondisi ini menciptakan dilema tersendiri bagi masyarakat, di satu sisi terdapat rasa empati terhadap kondisi ekonomi pengemis, namun di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial sebagai landasan hukum dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan peraturan tersebut, aktivitas mengemis di ruang publik merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi. Bahkan, masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan atau pengemis di jalan juga dapat dikenai denda hingga Rp50 juta atau pidana kurungan maksimal tiga bulan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara rutin melaksanakan operasi penertiban terhadap pengemis di berbagai titik strategis kota. Namun demikian, fenomena pengemis agresif masih terus berlangsung dan bahkan cenderung meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari raya keagamaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan pengemis bukan sekadar masalah penegakan peraturan semata, melainkan juga berkaitan dengan akar persoalan sosial ekonomi yang lebih dalam dan kompleks. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pengemis

meliputi ketidakmampuan bekerja di sektor formal, ketiadaan modal usaha, rendahnya keterampilan kerja, serta terbatasnya pilihan alternatif mata pencaharian. Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor sosial budaya yang turut mempengaruhi, seperti rendahnya harga diri, sikap pasrah pada nasib, serta anggapan bahwa mengemis merupakan jalan pintas untuk memperoleh penghasilan tanpa memerlukan keterampilan khusus. Penelitian ini menggunakan teori model *socio-ecological* Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk perilaku agresif pengemis di lampu merah, dipengaruhi oleh interaksi berbagai tingkat lingkungan. Tingkat ini meliputi *microsystem* (misalnya keluarga dan lingkungan langsung), *mesosystem* (interaksi antar *microsystem*), *exosystem* (lingkungan sosial yang lebih luas yang tidak langsung berinteraksi), dan *macrosystem* (nilai budaya dan sosial yang lebih luas). Dalam konteks pengemis agresif di Pekanbaru, perilaku mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, tekanan lingkungan sekitar, interaksi sosial sehari-hari, serta norma dan budaya masyarakat yang mempengaruhi strategi bertahan hidup mereka. Dengan demikian, agresivitas mereka dapat dipahami sebagai respons adaptif terhadap faktor-faktor lingkungan yang kompleks dan saling terkait. Sementara itu, Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui observasi dan imitasi dari lingkungan sosial. Pengemis agresif mungkin mencontoh perilaku tersebut dari pengemis lain atau lingkungan sekitar yang menganggap memaksa dalam meminta-minta sebagai strategi efektif untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, penguatan positif (misalnya mendapatkan uang dari perilaku agresif) juga memperkuat perilaku tersebut.

Dari segi moralitas merupakan prinsip-prinsip mengenai baik dan buruk yang dipatuhi dalam interaksi sosial, yang mengatur bagaimana individu seharusnya bersikap dan bertindak untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks pengemis, moralitas memainkan peran penting sebagai norma yang membatasi dan mengarahkan perilaku, termasuk perilaku agresif yang muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Perilaku agresif pengemis dapat dipahami sebagai gejala krisis moral di mana individu mengalami konflik internal antara kebutuhan bertahan hidup dan norma sosial yang mengharuskan sikap santun dan tidak memaksa. Krisis ini terjadi karena desakan kebutuhan fisiologis dan ekonomi yang sangat mendesak, sehingga menggeser batasan moral yang biasanya membatasi cara mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat (Hermawan, 2024). Sosiologi memandang perilaku pengemis sebagai manifestasi dari kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi pola interaksi dan stratifikasi dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan perilaku sosial pengemis, termasuk yang agresif di perkotaan, dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja. Fenomena pengemis ini juga dapat dilihat sebagai respon adaptif terhadap kesenjangan sosial yang menggiring mereka menjadi bagian dari subkultur tersendiri (AYU, 2017).

Antropologi memberikan perspektif budaya terhadap pengemis, melihat fenomena ini sebagai bagian dari sistem nilai, pola hidup, dan praktik sosial yang terinternalisasi dalam komunitas tertentu. Pendekatan antropologis menyoroti aspek kultural, identitas kelompok, dan struktur sosial yang membentuk perilaku agresif pengemis, sekaligus fungsi sosial yang dijalankan kelompok ini dalam konteks urban (Absari, 2025). Dampak keberadaan pengemis di lampu merah terhadap ketertiban umum sangat nyata. Keberadaan mereka seringkali menimbulkan gangguan lalu lintas, kemacetan, dan boleh jadi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga pengguna jalan. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi memunculkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap pengemis serta memperpanjang siklus kemiskinan yang sulit terputus apabila tidak ada penanganan yang komprehensi (Idza, 2023). Di Kota Pekanbaru, implementasi peraturan daerah yang mengatur ketertiban sosial sudah diterapkan untuk

mengatasi masalah pengemis di lampu merah, namun masih menghadapi kendala seperti kembalinya pengemis yang terjaring razia dan kurangnya minat pengemis mengikuti pelatihan sosial yang diselenggarakan. Dengan demikian, fenomena pengemis di lampu merah tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan sosial, tetapi juga masalah ketertiban umum yang memerlukan solusi terpadu yang melibatkan pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, dan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak agar pengemis bisa beralih dari cara hidup yang kurang produktif ke kondisi yang lebih mandiri dan tertib. Secara moral, fenomena pengemis agresif menunjukkan adanya kegagalan dalam nilai-nilai sosial yang diinternalisasi oleh individu (Jordan & Fauzi, 2024). Dalam perspektif moral, perilaku yang cenderung memaksa dan tidak menghargai privasi orang lain di ruang publik mencerminkan adanya degradasi moral yang dapat mengikis rasa empati dan solidaritas masyarakat. Fenomena ini berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan penerapan norma-norma etika seperti kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Keadaan ini membuka ruang bagi diskursus tentang perlunya pembinaan moral bagi pengemis dan masyarakat, agar sikap dan perilaku yang dihasilkan dapat mendukung ketertiban dan keharmonisan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial pengemis di lampu merah di Kota Pekanbaru dan dampaknya terhadap ketertiban umum. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi secara alami tanpa melakukan manipulasi variable. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan relevan terkait Fenomena Sosial Pengemis di Lampu Merah serta Dampaknya bagi Ketertiban Umum, antara lain pengendara motor/mobil masyarakat setempat, serta perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait fenomena sosial pengemis di lampu merah serta dampaknya terhadap ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Melalui wawancara semi-terstruktur ini, peneliti berharap dapat menggali informasi yang lebih lengkap dan tentang motivasi pengemis serta untuk memahami perspektif berbagai pihak, termasuk pengendara, masyarakat setempat, dan petugas Satpol PP, dalam rangka mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, dilakukan juga teknik observasi lapangan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengemis di lampu merah Kota Pekanbaru beserta interaksinya dengan masyarakat sekitar dan petugas keamanan. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti berada di lokasi dan memperhatikan secara seksama perilaku pengemis, respons pengguna jalan, serta kondisi sekitar yang memengaruhi fenomena sosial tersebut. Observasi ini bersifat tidak terstruktur, sehingga peneliti dapat mencatat berbagai kejadian secara spontan dan detail tanpa membatasi fokus hanya pada aspek tertentu saja. Tujuan dari observasi lapangan ini adalah untuk memperoleh data yang autentik dan komprehensif mengenai situasi nyata di lokasi, yang mendukung wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena sosial pengemis di lampu merah Kota Pekanbaru masih menjadi persoalan nyata yang mempengaruhi ketertiban umum di wilayah tersebut. Observasi dan wawancara yang dilakukan terdiri dari 5 informan yaitu 2 pengemis, 1 Satpol PP, 1 Pengendara motor, dan 1 warga setempat. Hasilnya mengungkapkan bahwa jumlah

pengemis di beberapa titik lampu merah strategis seperti Jalan Soekarno Hatta, Jalan Garuda Sakti, Jalan Diponegoro masih cukup tinggi, dengan aktivitas meminta-minta terus menerus. Meskipun telah dilakukan upaya penertiban dan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pengemis yang berhasil ditertibkan seringkali kembali ke jalanan setelah pembinaan, sehingga dampak penertiban terhadap pengurangan jumlah pengemis belum optimal. Dalam pembahasan, ditemukan beberapa faktor penghambat keberhasilan penertiban, antara lain kurangnya kesadaran sosial dan pemahaman masyarakat tentang peraturan ketertiban sosial, kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur penegak ketertiban, serta resistensi dan perilaku menghindar dari pengemis saat razia. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah sosial yang tidak hanya memerlukan penertiban fisik, tetapi juga pendekatan sosial. Selain itu, keberadaan pengemis di lampu merah berkontribusi pada ketidaknyamanan pengguna jalan, kemacetan lalu lintas, dan potensi gangguan ketertiban umum. Hal ini mempertegas pentingnya kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparatur keamanan, komunitas sosial, hingga masyarakat umum untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan program penertiban perlu ditingkatkan efektivitasnya dengan pendekatan yang lebih humanis dan terintegrasi agar target pengurangan jumlah pengemis di lampu merah dapat tercapai secara nyata.

Karakteristik Perilaku Sosial Pengemis Agresif yang Sering Muncul di Lampu Merah

Perilaku pengemis agresif di lampu merah Kota Pekanbaru menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks dan terus berkembang. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan persoalan moral, hukum, dan struktur sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Pekanbaru (Bapak Savran, 29 Oktober 2025), diketahui bahwa perilaku pengemis kini tidak lagi bersifat pasif seperti dulu, melainkan semakin agresif dan bahkan terorganisir. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial di tengah tekanan ekonomi perkotaan.

1. Bersifat Memaksa dan Mengganggu Ketertiban Umum. Fenomena pertama yang menonjol adalah sifat memaksa para pengemis ketika meminta uang di lampu merah. Mereka tidak hanya berdiri di pinggir jalan, tetapi aktif mengetuk kaca kendaraan, menarik perhatian dengan suara keras, bahkan dalam beberapa kasus menggores kendaraan karena tidak diberi uang. Perilaku ini dianggap mengganggu ketertiban umum dan melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Dalam perspektif sosial, tindakan ini mencerminkan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*) karena bertentangan dengan norma sopan santun dan keteraturan publik. Menurut hasil wawancara, Satpol PP menegaskan bahwa bentuk perilaku agresif seperti ini sering memicu aduan masyarakat, terutama dari pengendara yang merasa terancam. Secara moral, perilaku ini juga menunjukkan adanya penurunan nilai kesabaran, rasa malu, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Pengemis agresif muncul karena adanya pembiaran sosial dan ketidaktegasan masyarakat dalam menolak praktik mengemis di jalan. Masyarakat yang terus memberi uang justru memperpanjang siklus perilaku agresif tersebut (Puspitasari, 2021).
2. Terorganisir dan Dikoordinasi oleh Pihak Tertentu. Satpol PP menemukan adanya koordinator atau pihak penggerak yang mengatur para pengemis di titik-titik strategis seperti lampu merah Mall SKA, Jalan Nangka, dan Flyover Sudirman. Para koordinator ini memanfaatkan individu lain (terutama perempuan dan anak-anak) untuk mengemis demi keuntungan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas mengemis tidak selalu murni karena kebutuhan pribadi, melainkan sudah menjadi "sistem ekonomi informal" yang terorganisir. Dalam sosiologi, hal ini termasuk dalam kategori eksloitasi sosial, yaitu ketika

individu atau kelompok memanfaatkan orang lain yang lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Bentuk pengorganisasian ini merupakan gejala eksplorasi sosial, di mana pihak yang memiliki kuasa ekonomi atau sosial memanfaatkan kelompok rentan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, ibu-ibu, anak-anak, dan penyandang disabilitas menjadi alat produksi belas kasihan (Anita & Nurmasari, 2024). Secara hukum, bentuk ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jika melibatkan anak-anak).

3. Melibatkan Kelompok Rentan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis yang diamankan berasal dari kelompok rentan—terdiri dari anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Mereka dijadikan “alat” untuk menarik simpati publik. Anak-anak sering dibiarkan duduk di trotoar, sementara ibunya meminta uang di antara kendaraan. Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena termasuk bentuk eksplorasi anak. Satpol PP bahkan menemukan anak berusia 2 tahun hingga SD yang ikut mengemis. Kondisi ini menandakan lemahnya peran keluarga dalam melindungi anak dan menunjukkan adanya degradasi moral di tingkat masyarakat bawah. Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, penggunaan anak dalam aktivitas mengemis menyalahi prinsip kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak (Yendrita, 2022). Dari perspektif sosiologi, keterlibatan kelompok rentan memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan hasil dari struktur sosial yang tidak adil. Keluarga yang tidak memiliki pilihan ekonomi akhirnya menyerahkan moralitasnya pada kebutuhan bertahan hidup.
4. Menggunakan Strategi Simpati. Strategi sosial yang digunakan pengemis di lampu merah menjadi semakin kompleks. Mereka tahu bagaimana memunculkan simpati—with berpakaian lusuh, membawa bayi, menyebut nama Tuhan, hingga menangis di tengah jalan. Dalam teori Interaksi Simbolik Erving Goffman (1959), fenomena ini disebut impression management, yaitu usaha individu membentuk citra tertentu. Simbol-simbol religius yang digunakan pengemis adalah alat sosial untuk meneguhkan identitas sebagai “orang lemah” dan “patut dikasihani.” Namun di sisi lain, tindakan ini juga merupakan bentuk manipulasi emosional masyarakat (Nurhasanah, 2020). Dalam wawancara, Satpol PP mengakui bahwa masyarakat Pekanbaru masih mudah tersentuh oleh tampilan-tampilan seperti itu, sehingga para pengemis terus menggunakan pola yang sama. Akibatnya, praktik mengemis semakin subur karena sistem empati masyarakat tidak diimbangi dengan kesadaran moral dan hukum
5. Bersifat Adaptif terhadap Situasi Lampu Lalu Lintas. Fenomena mengemis di lampu merah bukan dilakukan secara acak. Para pengemis memahami pola waktu lalu lintas—mereka bergerak cepat ketika lampu merah menyala dan berhenti ketika lampu hijau. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang tinggi atau disebut resiliensi sosial (*social resilience*). Kemampuan pengemis untuk membaca situasi lalu lintas dan memanfaatkan celah waktu menunjukkan kecerdikan sosial. Namun, kecerdikan ini tetap berada dalam konteks penyimpangan karena mengganggu ketertiban umum. Satpol PP juga menjelaskan bahwa titik-titik seperti SKA, Jalan Nangka, dan Flyover Sudirman menjadi lokasi favorit karena padat kendaraan dan memiliki durasi lampu merah yang lama. Pola ini memperlihatkan bahwa aktivitas mengemis telah menjadi pekerjaan “profesional” bagi sebagian kelompok, bukan lagi tindakan darurat karena kelaparan.
6. Berpotensi Menimbulkan Tindak Kriminal Ringan. Selain meminta, beberapa pengemis juga melakukan tindak kriminal ringan, seperti mencuri barang kecil, memalak, atau mengancam pengendara. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Satpol PP, ada kasus pengambilan tas dan HP oleh pengemis di perempatan jalan. Fenomena ini memperlihatkan

pergeseran dari aktivitas ekonomi informal ke perilaku kriminal. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian ringan (Pasal 362 KUHP). Ketika praktik mengemis dibiarkan, ia akan berkembang menjadi bentuk-bentuk penyimpangan baru yang berpotensi merusak keamanan publik (Hasibuan, 2023). Oleh karena itu, Satpol PP melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis, tetapi tetap memberikan efek jera berupa sanksi administratif.

7. Kemiskinan dan Migrasi Antar-Daerah. Sebagian besar pengemis di Pekanbaru bukan penduduk lokal, melainkan datang dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Medan. Mereka berpindah ke Pekanbaru karena kota ini dianggap memiliki peluang ekonomi lebih besar. Fenomena ini merupakan akibat dari kemiskinan struktural dan migrasi ekonomi. Dari perspektif moral, kondisi ini menunjukkan krisis nilai kerja keras dan kemandirian. Banyak individu memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa mempertimbangkan harga diri dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam wawancara, Satpol PP menegaskan bahwa sebagian besar pengemis yang tertangkap telah beberapa kali dikembalikan ke daerah asal, tetapi kembali lagi ke Pekanbaru karena faktor ekonomi yang mendesak.

Faktor yang Mendorong Pengemis dalam Meminta-minta di Lampu Merah

Perilaku pengemis yang bersikap agresif di lampu merah Kota Pekanbaru menjadi potret nyata dari permasalahan sosial yang semakin kompleks di wilayah perkotaan. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa yang berkembang pesat (AULIYA P.H, 2023). Namun, di balik kemajuan ekonomi tersebut, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan terpinggirkan secara sosial. Salah satu manifestasi nyata dari kesenjangan sosial ini adalah meningkatnya jumlah pengemis di titik-titik lampu merah yang menunjukkan perilaku agresif saat meminta uang kepada pengendara. Perilaku ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik motivasi pribadi maupun kondisi sosial ekonomi yang menekan kehidupan mereka. Motivasi utama yang mendorong pengemis di Pekanbaru menjadi agresif adalah kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Sebagian besar pengemis hidup dalam situasi serba kekurangan, tanpa pekerjaan tetap dan penghasilan pasti. Mereka sering kali harus menanggung beban keluarga, seperti kebutuhan makan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga biaya tempat tinggal. Dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, mengemis menjadi satu-satunya cara yang mereka anggap mampu memberikan hasil cepat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, banyak pengemis berasal dari keluarga miskin di daerah pinggiran atau pendatang dari luar kota yang tidak memiliki keterampilan kerja memadai. Mereka memilih lampu merah sebagai lokasi strategis karena arus kendaraan yang padat dan waktu berhenti yang cukup lama memungkinkan mereka mendekati pengendara dengan cepat. Dalam situasi terdesak tersebut, sikap agresif muncul sebagai strategi untuk menarik perhatian dan memperoleh belas kasihan.

Selain itu, persaingan antar pengemis di lokasi strategis turut memperkuat munculnya perilaku agresif. Titik-titik lampu merah di Pekanbaru seperti di simpang SKA, simpang Harapan Raya, atau simpang Tiga Bandara sering menjadi tempat berkumpulnya banyak pengemis dalam waktu bersamaan. Karena jumlah pengemis lebih banyak daripada pengendara yang berhenti, mereka terlibat dalam persaingan tidak langsung untuk mendapatkan perhatian. Dalam kondisi demikian, pengemis yang bersikap memaksa, mengetuk kaca kendaraan, atau bahkan mengikuti pengendara sampai lampu hijau sering dianggap lebih efektif mendapatkan uang. Selanjutnya, kebiasaan dan pengalaman hidup di

jalan juga menjadi faktor penting. Banyak pengemis di Pekanbaru yang sudah bertahun-tahun menjalani aktivitas ini dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Dari pengalaman panjang tersebut, mereka "belajar" bahwa cara yang agresif lebih efektif menarik perhatian pengguna jalan. Kebiasaan ini kemudian membentuk pola perilaku yang sulit diubah. Seiring waktu, agresivitas tidak lagi dianggap sebagai tindakan melanggar norma, melainkan strategi sosial yang wajar di antara komunitas pengemis (KRISTIANI, 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pengemis Menjadi Agresif dalam Meminta di Lampu Merah.

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksloitasi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini maka faktor ekonomi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya kenapa banyak orang yang melakukan tindak kejahata. Seperti pengangguran dan tingginya biaya hidup.
2. Faktor Pendidikan. Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksloitasi anak menjadi lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan orangtua tidak paham mendidik anak dengan cara yang tepat. Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang. Orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya di jalanan dengan cara bekerja, mengemis, mengamen dan sebagainya demi mendapatkan uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan di sekolah akan menyebabkan berkurangnya pemasukan orangtua berkurang dan membuat biaya keluarga semakin bertambah.
3. Faktor Psikologis. Berperan besar dalam membentuk perilaku agresif. Tekanan hidup yang berat, rasa putus asa, dan kehilangan harga diri akibat kemiskinan yang menahan dapat menurunkan kontrol diri seseorang. Beberapa pengemis mengalami stres kronis dan trauma sosial akibat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Akibatnya, mereka tidak lagi merasa malu untuk memaksa, berbicara keras, atau mengetuk-ngetuk kendaraan dengan emosi. Dalam konteks Pekanbaru, fenomena ini sering terlihat di kawasan padat lalu lintas seperti Jalan Sudirman atau simpang Mall SKA, di mana pengemis anak-anak dan dewasa memperlihatkan perilaku memaksa karena tekanan psikologis dan keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa agresivitas tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga merupakan reaksi emosional terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami. Selain itu, respon negatif masyarakat terhadap keberadaan pengemis turut mendorong perilaku agresif. Banyak pengendara yang memilih untuk mengabaikan, menolak dengan keras, atau bahkan memarahi pengemis yang datang. Pengalaman ditolak berulang kali membuat sebagian pengemis kehilangan empati dan bersikap defensif. Mereka berasumsi bahwa dengan memaksa atau bersikap tegas, pengendara akan lebih cepat memberi uang agar tidak diganggu. Siklus ini terus berulang hingga menjadi pola perilaku yang sulit diputus. Dari sisi kondisi sosial ekonomi, faktor kemiskinan struktural menjadi akar utama yang melatar belakangi aktivitas mengemis di Pekanbaru. Kemiskinan struktural

berarti kondisi di mana masyarakat tidak hanya kekurangan materi, tetapi juga terhambat oleh sistem sosial yang tidak adil, seperti minimnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial. Banyak pengemis di Pekanbaru berasal dari keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak hingga tingkat menengah, sehingga keterampilan kerja mereka terbatas. Kondisi ini diperparah oleh biaya hidup kota yang terus meningkat dan ketimpangan ekonomi antara penduduk kota dan pendatang dari desa. Akibatnya, sebagian warga yang tidak memiliki modal maupun pendidikan memilih mengemis sebagai jalan terakhir.

4. Faktor Sosial Budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis seperti, rendahnya harga diri dan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta, Sikap pasrah pada nasib mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan, kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang terdapat karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka.
5. Faktor Ketimpangan Kota. Sebagai kota tujuan migrasi di Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi magnet bagi warga desa di sekitar Siak, Kampar, dan Pelalawan untuk mencari pekerjaan. Namun, tidak semua pendatang mampu bersaing dalam pasar kerja yang padat dan membutuhkan keterampilan. Sebagian dari mereka akhirnya menjadi pengemis atau pekerja informal di jalanan. Minimnya pengawasan dan kebijakan sosial juga memperparah masalah ini. Meskipun Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki program penertiban dan rehabilitasi pengemis, pelaksanaannya sering kali tidak efektif karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Banyak pengemis yang sudah terjaring razia kembali turun ke jalan karena tidak memiliki alternatif mata pencaharian.

Budaya sosial masyarakat yang dermawan juga secara tidak langsung memperkuat perilaku mengemis. Banyak masyarakat Pekanbaru yang masih memberi uang kepada pengemis karena rasa iba, terutama saat lampu merah. Namun, tindakan memberi secara spontan justru memperkuat keyakinan bahwa cara agresif adalah cara yang berhasil. Dari perspektif moral, fenomena pengemis yang bersikap agresif di lampu merah Kota Pekanbaru menggambarkan dilema antara kebutuhan dasar dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Di satu sisi, agresivitas yang ditunjukkan oleh pengemis dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Namun, dari sisi lain, perilaku tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang batas antara hak untuk bertahan hidup dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Mengetuk kaca kendaraan, memaksanya, atau mengikuti pengendara bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketakutan bagi masyarakat. Dalam konteks moral, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan atau mengganggu orang lain, sementara masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk menanggapi kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan empati dan solusi yang berkelanjutan, bukan hanya dengan memberi secara spontan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa solusi terbaik bukan hanya pada penertiban atau pemberian belas kasihan semata, tetapi pada upaya kolektif untuk membangun sistem sosial yang lebih adil dan memberdayakan bagi semua pihak.

Persepsi Masyarakat Setempat terhadap Keberadaan Pengemis di Lampu Merah terutama dalam Hal Pengaruhnya terhadap Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti membagi persepsi masyarakat menjadi dua, diantaranya:

1. Masyarakat sekitar Lampu Merah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masyarakat yang beraktivitas di sekitar area lampu merah pada umumnya memiliki persepsi negatif terhadap keberadaan pengemis agresif. Aktivitas mengemis memang sering ditemui di kawasan perkotaan dan dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena sosial akibat kesenjangan ekonomi, namun perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian pengemis agresif telah menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Menurut Ibu Marnida (62), keberadaan pengemis di kawasan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengancam ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Beberapa pengemis kerap menghampiri kendaraan yang berhenti di lampu merah dengan cara yang memaksa, seperti mengetuk kaca mobil berulang kali, menatap tajam, atau menadahkan tangan sambil berbicara dengan nada tinggi. Tindakan seperti ini membuat sebagian pengendara merasa takut dan tidak nyaman. Bahkan, tidak jarang pengemis menyeberang secara tiba-tiba di tengah kemacetan, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dari sisi lingkungan sosial, keberadaan pengemis agresif juga memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pedagang kecil atau penjual kaki lima di sekitar lokasi sering kali merasa terganggu karena situasi tersebut menciptakan citra lingkungan yang tidak aman dan kurang tertib, sehingga mengurangi minat pembeli untuk singgah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena pengemis agresif bukan sekadar masalah individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan ekonomi lokal {Formatting Citation}. Dalam menyikapi hal tersebut, warga sekitar memiliki berbagai bentuk reaksi. Sebagian masyarakat memilih untuk menegur atau mengusir pengemis yang bersikap kasar walaupun warga juga takut apabila ada penyerangan, sedangkan sebagian lainnya lebih memilih melaporkan kepada aparat ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Pengendara Umum. Dari perspektif pengendara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka juga merasa terganggu dan khawatir terhadap keberadaan pengemis agresif di persimpangan lampu merah. Menurut Ibu Vannya(27) pengemis yang mendatangi kendaraan dengan sikap memaksa sering kali menimbulkan rasa tidak aman bagi pengendara, terutama bagi perempuan atau orang tua. Aktivitas tersebut tidak hanya menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas dan kemacetan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil, misalnya saat pengemis yang merasa tersinggung merusak kendaraan atau mengetuk kaca dengan keras. Sebagai bentuk respon, sebagian besar pengendara memilih menghindar dengan menutup kaca jendela atau tidak menanggapi pengemis tersebut. Namun, ada pula yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Satpol PP atau kepolisian setempat agar ditindaklanjuti. Tindakan masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa penertiban sosial diperlukan demi menjaga ketertiban umum dan keamanan pengguna jalan.

Dari perspektif moralitas sosial, fenomena pengemis agresif menunjukkan adanya penurunan nilai moral dalam interaksi sosial. Dalam norma masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan dan saling menghormati, tindakan memaksa atau mengintimidasi orang lain demi memperoleh uang dianggap bertentangan dengan nilai moral dan etika sosial. Selain itu, dari sisi masyarakat yang memberi, fenomena ini menimbulkan dilema moral di satu sisi ingin membantu sesama, tetapi di sisi lain tidak ingin. Oleh karena itu, solusi yang bermoral adalah dengan menyalurkan bantuan melalui jalur yang lebih tepat, seperti lembaga sosial, panti asuhan, atau program pemerintah yang mengurus fakir miskin. Dengan demikian, persoalan pengemis agresif bukan hanya masalah ketertiban umum, tetapi juga refleksi dari krisis moral dan sosial yang perlu ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.

Dampak Perilaku Pengemis terhadap Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan Masyarakat di Sekitar Lampu Merah

Dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar lampu merah cukup mengganggu. Para pengemis biasanya menempati trotoar, bahu jalan, atau bahkan area depan toko dan warung terutama warung makan untuk berkumpul-kumpul, beristirahat atau menunggu giliran meminta. Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat sekitar yang ingin berjalan, berjalan, atau melintas dengan aman karena timbul rasa was-was adanya tindak pencurian. Berdasarkan keterangan Bapak Savran S.E selaku Satpol PP bagian analisis pengaduan masyarakat, sering dijumpai perilaku sebagian pengemis yang menyalahgunakan hasil mengemisnya untuk hal-hal negatif. Seperti membeli minuman keras, obat-obatan terlarang, atau melakukan kegiatan "ngelem" yang menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat. Kebiasaan tersebut tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal seperti kekerasan saat mereka berada di bawah pengaruh zat berbahaya. Pada titik inilah pergeseran moral terjadi. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab, mengemis sebagai pilihan hidup yang disengaja justru melemahkan karakter dasar tersebut. Pengemis yang terbiasa menerima belas kasihan tanpa usaha dapat kehilangan rasa harga diri dan motivasi untuk memperbaiki hidupnya. Selain itu, masyarakat juga merasa tidak nyaman secara sosial karena timbul rasa kasihan yang bercampur dengan perasaan tidak berdaya untuk membantu. Hal ini dapat memunculkan kepekaan sosial yang negatif, di mana masyarakat menjadi terbiasa dengan pemandangan kemiskinan di ruang publik dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Hal ini disebut moral *hazard* sosial, yaitu kondisi ketika tindakan kebaikan justru menghasilkan dampak yang bertentangan dengan nilai moral yang ingin dijunjung (Aprilia et al., 2024). Pengemis semakin bergantung pada pemberian, sementara masyarakat perlahan menganggap kemiskinan di ruang publik sebagai hal biasa dan bukan masalah bersama yang harus diselesaikan.

Selain itu, situasi ini memicu degradasi nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Nilai gotong royong yang idealnya mendorong masyarakat saling membantu secara produktif, berubah menjadi praktik memberi tanpa pemulihannya. Sikap bantu-membantu kehilangan arah ketika tidak dibarengi penguatan kemampuan hidup mandiri. Dalam konteks budaya, ini berarti hilangnya prinsip malu dalam bekerja untuk hidup, karena makna harga diri mulai memudar ketika mengemis dianggap cara cepat memperoleh uang. Dalam tataran moral publik, hal ini menggerus kualitas karakter masyarakat: pengemis kehilangan dorongan untuk berusaha, masyarakat kehilangan sensitivitas, dan negara tampak kurang hadir dalam penanganan sosial yang substantif. Akibatnya, kawasan sekitar lampu merah tidak hanya menjadi kumuh secara fisik, tetapi juga menurun secara moral dan sosial. Ruang publik yang idealnya mencerminkan keteraturan dan keharmonisan berubah menjadi simbol kegagalan nilai bersama. Pada akhirnya, permasalahan ini bukan sekadar soal ketertiban lalu lintas atau kenyamanan. Mengembalikan nilai harga diri, kemandirian, usaha, dan kedulian sosial menjadi kunci utama. (Rahmatullah et al., 2024).

Dari segi keamanan, ada juga kekhawatiran akan munculnya tindakan kejahatan yang berkedok meminta-minta. Dengan memanfaatkan pengendara yang lengah untuk melakukan pencurian HP pengendara yang diletak di saku motor dengan modus mengalihkan perhatian menggunakan pengemis lainnya untuk meminta lalu ia pun beraksi. Belum lagi pengemis yang bersikap terlalu memaksa atau agresif dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengguna jalan ataupun masyarakat, terutama bagi perempuan yang berkendara sendirian. Tindakan seperti mengetuk kaca mobil, memegang motor, atau memaksa membuka jendela dapat menimbulkan ketakutan dan ketegangan di jalan. Banyak orang merasa terganggu atau takut ketika didatangi secara tiba-tiba, apalagi jika dilakukan dengan cara yang tidak sopan. Suasana

di sekitar lampu merah menjadi kurang menyenangkan karena masyarakat harus terbiasa melihat kegiatan meminta-minta yang sering kali diiringi dengan penampilan kotor, bau, atau perilaku memaksa. Selain itu, masyarakat juga merasa tidak nyaman secara sosial karena timbul rasa kasihan yang bercampur dengan perasaan tidak berdaya Hal ini dapat memunculkan kepekaan sosial yang negatif, di mana masyarakat menjadi terbiasa dengan pemandangan kemiskinan di ruang publik dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar.

Dari sisi ketertiban umum, keberadaan pengemis di lampu merah juga memperburuk kelancaran arus lalu lintas. Ketika pengemis mendatangi pengendara di tengah jalan, sering kali menyebabkan kemacetan dan membahayakan keselamatan, baik bagi pengemis maupun pengguna jalan. Situasi ini dapat mengganggu kerja aparat lalu lintas yang berusaha menjaga keteraturan di jalan raya. Beberapa pengemis juga membuang sampah sembarangan atau tidur di trotoar, yang membuat lingkungan terlihat kumuh dan tidak terawat. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penurunan citra kawasan. Daerah yang dipenuhi pengemis di lampu merah sering kali dianggap sebagai kawasan yang tidak aman, kotor, dan tidak tertib. Hal ini dapat mengurangi minat pengunjung, investor, atau pembeli untuk datang ke wilayah tersebut. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat sekitar ikut menurun karena lingkungan tidak lagi nyaman bagi usaha perdagangan maupun pariwisata. Pada titik ini, masalah tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyinggung aspek moral dan nilai sosial. Lingkungan yang seharusnya menjadi ruang bersama untuk hidup berdampingan dengan tertib dan saling menghargai berubah menjadi ruang yang menunjukkan kegagalan nilai dasar seperti tanggung jawab, kebersihan, serta kepedulian terhadap keteraturan. Citra lingkungan mencerminkan wajah moral masyarakatnya. Ketika ruang publik dipenuhi perilaku meminta-minta tanpa upaya perbaikan, dan kemiskinan dijadikan tontonan harian membuat pudarnya kualitas kepedulian. Ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa membuat kondisi keduanya semakin berbeda. Kota terlihat lebih maju dan menjanjikan, sementara desa tertinggal dalam akses pekerjaan dan fasilitas. Perbedaan ini mendorong banyak orang dari desa datang ke kota dengan harapan dapat memperbaiki nasibnya. Namun, ketika sampai di kota, tidak semua memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Akibatnya, banyak dari mereka justru kesulitan mendapatkan pekerjaan layak dan tempat tinggal. Situasi tersebut membuat sebagian orang terpaksa hidup di jalanan dan mengandalkan meminta-minta untuk bertahan hidup. Dari sinilah kemudian muncul istilah *Gepeng* (gelandangan dan pengemis) Dengan demikian, perilaku pengemis di sekitar lampu merah menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari ketertiban lalu lintas, keamanan sosial, kenyamanan psikologis, hingga citra dan kebersihan lingkungan.

Upaya yang Dilakukan dalam Menertibkan Pengemis di Lampu Merah

Pengemis merupakan salah satu fenomena sosial yang sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan (Putri et al., 2021). Permasalahan yang melibatkan gelandangan dan pengemis di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, telah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Peraturan ini merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (Rimaldo et al., n.d.). Kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diputuskan oleh pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk menjalankan Perda tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dan program penertiban terhadap gelandangan dan pengemis agar tercipta lingkungan

kota yang tertib dan teratur. Gelandangan sering kali menimbulkan perilaku yang berdampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam bentuk gangguan atau kekerasan di ruang publik. Menurut Bapak Safrans, S.E., selaku Analis Pengaduan Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, pemerintah melalui Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penertiban dan pendekatan humanis terhadap pengemis, khususnya yang bersikap agresif di jalan raya. Upaya tersebut meliputi penyisiran dan penertiban rutin di lokasi rawan, pendataan terhadap para pengemis, serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Menurut beliau, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat umum serta pembinaan bagi gepeng agar hidup mandiri.

1. Razia. Salah satu bentuk nyata dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dan Satpol PP dalam menegakkan Perda tersebut adalah melalui kegiatan razia terhadap gelandangan dan pengemis. Razia ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, indah, dan nyaman bagi seluruh warga. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memutus rantai pengemis di jalan. Untuk menjalankan kegiatan razia secara efektif, Satpol PP Kota Pekanbaru membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan penertiban di lapangan. Setelah penertiban dilakukan, Dinas Sosial mengambil peran dalam memberikan pembinaan, pelatihan keterampilan, serta pemantauan terhadap para pengemis agar mereka tidak kembali ke jalanan. Dalam pelaksanaannya, razia dilakukan secara rutin dan difokuskan pada lokasi-lokasi strategis yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para pengemis, seperti persimpangan jalan, pasar, dan pusat perbelanjaan. Beberapa tujuan utama dari kegiatan razia ini antara lain:
 - a. Meningkatkan martabat gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal dalam kehidupan sehari-hari
 - b. Menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan tenteram
2. Tim Khusus. Dalam rangka memperkuat upaya penertiban, Satpol PP Kota Pekanbaru membentuk Tim Khusus yang bertugas melaksanakan razia dan patroli lapangan. Tim ini berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial serta pihak kepolisian untuk memastikan proses berjalan tertib dan sesuai prosedur. Penertiban biasanya dilakukan secara intensif, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri, guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pengemis dari luar daerah. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar pengemis yang terjaring berasal dari luar Kota Pekanbaru, bahkan ada yang datang dari Sumatera Barat, Jambi, dan Medan, karena menganggap Pekanbaru sebagai kota besar yang ramai dan potensial. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kendala, terutama karena belum tersedianya tempat penampungan khusus bagi gelandangan dan pengemis. Meski demikian, pembinaan tetap dilakukan sebisa mungkin agar mereka dapat beradaptasi dan tidak kembali ke jalan.
3. Melakukan Pembinaan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan berbagai bentuk pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis, antara lain dengan memberikan pelatihan pembuatan kue, menjahit dan ada juga yang di kemudian di kembalikan ke daerah asal (Purnama & Febri, n.d.). Melalui pembinaan ini, diharapkan para peserta dapat memiliki kemampuan yang berguna untuk mencari nafkah secara mandiri dan tidak kembali mengemis beberapa pembinaan yang dilakukan adalah:
 - a. Pembinaan Mental. Aspek ini menjadi perhatian utama karena fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, jika dilihat dari sisi budaya, menunjukkan adanya sifat tidak produktif, enggan berubah, dan merasa nyaman dalam kondisi miskin. Hal ini terjadi karena mereka dapat dengan mudah memperoleh uang dengan mengemis di jalanan

tanpa merasa malu. Oleh karena itu, pembinaan mental bertujuan untuk menumbuhkan motivasi agar para gelandangan dan pengemis dapat mengurangi sifat malas serta menanamkan kesadaran untuk hidup lebih mandiri dan bermartabat.

- b. Pembinaan Keterampilan. Program pembinaan keterampilan dilakukan sebagai pelengkap dari pembinaan mental. Melalui pelatihan ini, para gelandangan dan pengemis yang bersedia mengikuti diarahkan untuk memiliki kemampuan kerja yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, harga diri, dan kepercayaan diri mereka, serta menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya bekerja dan berusaha.

Tujuan utama dari program ini adalah agar mereka memiliki kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berperan aktif di masyarakat. Selain itu, pembinaan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan keimanan serta membawa kebahagiaan lahir dan batin. Namun, keberhasilan program pembinaan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berperan penting dalam menertibkan dan mengamankan gelandangan serta pengemis yang ditemukan di berbagai lokasi di Pekanbaru untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial. Setelah itu, mereka akan mendapatkan pengarahan dan pembinaan agar mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Fenomena Pengemis Agresif dan Terorganisir Dalam beberapa tahun terakhir, Satpol PP menemukan fenomena pengemis agresif dan terorganisir. Beberapa oknum memanfaatkan orang lain, termasuk anak-anak, ibu-ibu, dan penyandang disabilitas. Tindakan ini jelas merupakan bentuk eksplorasi manusia, dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP bersama Dinas Sosial melakukan pendataan dan pembinaan bagi para pengemis yang terjaring. Mereka yang masih mampu bekerja diberikan pelatihan keterampilan, sementara yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke tempat asal.

Dalam beberapa kasus, pelaku utama atau koordinator pengemis diberikan sanksi administratif sesuai dengan Perda. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sekitar 70% pengemis sudah berhasil ditertibkan, sementara 30% lainnya masih dalam proses pembinaan. Pengemis Agresif di Lampu Merah adalah salah satu fenomena yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah pengemis agresif di lampu merah, yang terkadang memaksa, mengetuk kaca mobil, bahkan menggores kendaraan. Satpol PP menanganinya dengan lebih tegas untuk memberikan efek jera. Meskipun demikian, pendekatan yang dilakukan tetap humanis dan persuasif, terutama jika yang diamankan adalah anak-anak. Penanganan terhadap anak dilakukan oleh petugas Satpol PP perempuan agar prosesnya lebih aman dan tidak menimbulkan trauma. Data dan Titik Rawan Pengemis Berdasarkan hasil operasi terbaru, Satpol PP telah melaksanakan dua kali operasi besar dalam satu bulan terakhir:

1. Operasi pertama berhasil menertibkan 47 orang pengemis.
2. Operasi kedua menertibkan 45 orang pengemis.

Beberapa titik rawan pengemis di Kota Pekanbaru antara lain: Lampu merah SKA, Jalan Nangka, Jalan Garuda Sakti, Pasar Pagi Arengka, Flyover Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Kawasan mal dan pusat perbelanjaan Selain mengemis, sebagian dari mereka juga melakukan kegiatan seperti menjual tisu, koran, atau menggunakan kemoceng dari tutup botol, yang pada akhirnya tetap bermuara pada meminta uang. Dalam beberapa laporan, bahkan ditemukan adanya tindak pencopetan atau perampasan ringan. Eksplorasi Anak dan Masalah Sosial Turunan Salah satu masalah paling memprihatinkan adalah eksplorasi anak-anak untuk mengemis. Banyak ditemukan anak-anak berusia 2 tahun hingga usia sekolah dasar yang

dipaksa untuk ikut mengemis bersama orang dewasa. Akibatnya, mereka putus sekolah dan rentan terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu, kegiatan mengemis juga kerap menjadi pintu masuk bagi masalah sosial lain, seperti: Penyalahgunaan narkoba atau lem, Minuman keras di area lampu merah, Pergaulan bebas di kalangan remaja, Pencurian kabel CCTV dan fasilitas umum. Masalah-masalah ini memperlihatkan bahwa fenomena pengemis tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan kota.

Upaya Jangka Panjang dan Peran Masyarakat Sebagai upaya jangka panjang, Satpol PP bersama Dinas Sosial melakukan patroli rutin setiap hari di berbagai titik keramaian, terutama pada jam-jam rawan. Selain tindakan penertiban, Satpol PP juga berupaya melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam kampanye sosial, seperti memasang spanduk imbauan untuk tidak memberi uang kepada pengemis di jalan. Langkah ini terbukti efektif di beberapa lokasi, misalnya di Jalan Gajah Mada yang kini relatif bebas dari pengemis karena masyarakat tidak lagi memberi uang di jalan. Harapan Satpol PP Kota Pekanbaru berkomitmen menjaga ketertiban dan keindahan kota melalui pendekatan persuasif dan humanis, bukan kekerasan. Namun, keberhasilan penertiban pengemis tidak akan terwujud tanpa dukungan masyarakat. "Kami berharap masyarakat dapat berpandangan positif dan ikut membantu menertibkan pengemis. Jangan memberi uang di jalan, karena dengan berhenti memberi, kita ikut menghentikan praktik yang tidak baik. Jika menemukan pengemis yang bersikap memaksa atau mengganggu, segera laporkan ke Satpol PP agar dapat kami tindaklanjuti."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Satpol PP Kota Pekanbaru menyampaikan harapan besar agar seluruh elemen masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam mendukung upaya penertiban dan pembinaan terhadap para pengemis yang masih beraktivitas di jalanan. Kerja sama masyarakat dinilai sangat penting, terutama dalam hal tidak memberikan uang, makanan, atau bentuk bantuan lainnya secara langsung kepada para pengemis di tempat umum. Satpol PP menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis justru menjadi salah satu faktor yang membuat mereka terus bertahan di jalanan. Dengan tidak adanya pemberian dari masyarakat, diharapkan para pengemis akan menyadari bahwa kegiatan mengemis tidak lagi menjadi cara efektif untuk memperoleh penghasilan. Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk mengikuti program pembinaan dan pelatihan keterampilan yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Melalui kerja sama dan kesadaran masyarakat ini, Satpol PP optimis bahwa masalah pengemis dapat berkurang secara bertahap. Selain itu, lingkungan perkotaan seperti jalan raya, pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah akan menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Pada akhirnya, cita-cita untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, serta bebas dari aktivitas pengemis dapat benar-benar terwujud dengan dukungan penuh dari masyarakat.

KESIMPULAN

Fenomena pengemis agresif di lampu merah Kota Pekanbaru menunjukkan karakteristik yang kompleks dan terorganisir, meliputi perilaku memaksa yang mengganggu ketertiban umum, adanya koordinator yang mengeksploitasi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, penggunaan strategi manipulasi simpati melalui simbol-simbol religius dan penampilan memprihatinkan, serta kemampuan adaptif dalam memanfaatkan pola lalu lintas di titik-titik strategis seperti SKA, Jalan Nangka, dan Flyover Sudirman. Fenomena ini telah bergeger dari aktivitas ekonomi informal menjadi sistem terorganisir yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal ringan seperti pencurian dan pemalakan, sekaligus mencerminkan degradasi nilai moral masyarakat dalam bentuk eksplorasi sosial dan penurunan rasa malu serta penghargaan terhadap hak orang lain. Faktor-faktor pendorong perilaku agresif pengemis di lampu merah bersumber dari kondisi kemiskinan struktural yang



diperparah oleh keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja, tekanan ekonomi mendesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta persaingan antar pengemis di lokasi strategis yang memaksa mereka menggunakan cara-cara agresif untuk menarik perhatian pengendara. Faktor psikologis berupa stres kronis, tekanan hidup, dan kehilangan harga diri turut membentuk perilaku memaksa sebagai bentuk reaksi emosional terhadap penolakan berulang dari masyarakat. Fenomena ini diperburuk oleh faktor sosial budaya seperti rendahnya harga diri, sikap pasrah pada nasib, kebiasaan hidup menggelandang yang dianggap bebas, serta budaya dermawan masyarakat yang justru memperkuat keyakinan bahwa cara agresif efektif dalam memperoleh uang.

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan pengemis agresif di lampu merah menunjukkan pandangan negatif yang kuat, baik dari warga sekitar maupun pengendara umum. Masyarakat sekitar merasa terganggu karena aktivitas pengemis menciptakan lingkungan yang tidak aman, mengurangi kenyamanan sosial, dan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi lokal seperti pedagang kecil dan warung makan yang kehilangan pembeli akibat citra lingkungan yang tidak tertib. Pengendara umum mengalami ketidaknyamanan psikologis dan rasa terancam akibat tindakan memaksa seperti mengetuk kaca kendaraan, menatap tajam, atau bahkan merusak kendaraan yang tidak memberikan uang. Dari perspektif moral, fenomena ini menunjukkan penurunan nilai kesopanan dan saling menghormati dalam interaksi sosial, serta menimbulkan dilema moral bagi masyarakat antara keinginan membantu sesama dengan keengganan mendukung perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Dampak perilaku pengemis terhadap ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat bersifat multidimensional dan merugikan. Dari segi ketertiban, aktivitas mengemis menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengotori lingkungan dengan sampah, dan menurunkan citra kawasan sebagai tempat yang tidak aman dan kumuh yang berdampak pada berkurangnya minat investor dan pengunjung. Aspek keamanan terganggu dengan munculnya tindak kriminal berkedok meminta-minta seperti pencurian HP, pemalakan, dan penggunaan hasil mengemis untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang yang memicu kekhawatiran baru. Secara moral, fenomena ini mencerminkan degradasi nilai kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab sosial, serta memunculkan moral hazard sosial di mana masyarakat terbiasa dengan pemandangan kemiskinan di ruang publik dan menganggapnya wajar, sehingga menggerus kualitas karakter masyarakat dan sensitivitas sosial terhadap masalah kemiskinan yang seharusnya diselesaikan secara kolektif.

Upaya penertiban pengemis yang dilakukan Satpol PP dan pihak berwenang Kota Pekanbaru mencakup razia rutin di lokasi strategis, pembentukan Tim Khusus yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kepolisian, serta program pembinaan mental dan keterampilan bagi para pengemis yang terjaring agar dapat hidup mandiri dan produktif. Pendekatan yang dilakukan bersifat humanis dan persuasif dengan memberikan pelatihan pembuatan kue, menjahit, dan pengembalian pengemis ke daerah asal, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Pekanbaru seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Medan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan, melaporkan kasus pengemis agresif kepada pihak berwenang, dan berpartisipasi dalam kampanye sosial yang bertujuan memutus siklus ketergantungan pengemis pada belas kasihan publik demi mewujudkan Kota Pekanbaru yang tertib, aman, dan bebas dari aktivitas mengemis di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Absari, D. M. (2025). Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian Fenomena Pengemis Jalanan di Indonesia dalam Perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman. 4(5), 2077–2086.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4183>

- Anita, & Nurmasari. (2024). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan Dan. 1(1), 442–462.
- Aprilia, V., Dedi, S., & Habibie, K. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan Pengemis). 2(1), 661–676.
- Auliya Putriadi Hasibuan. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Pekanbaru.
- Ayu, S. R. (2017). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar).
- Hasibuan, A. P. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru - Repository Universitas Islam Riau.
- Hermawan, T. A. (2024). Pengaruh Moral Disengagement Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Agresivitas
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi Allisa, 5(September), 145–161.
- Jordan, J. A., & Fauzi, A. M. (2024). Rasionalitas Pengambilan Keputusan Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis Di Kecamatan Cibinong. 13(3), 1–10.
- Kristiani, R. S. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru). Npm : 161010428.
- Nurhasanah, L. (2020). Anxiety and depression_ a study of psychoaffective, family-related, and daily-life factors in celiac individuals.
- Purnama, A., & Febri, D. A. N. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 2(1).
- Puspitasari, S. (2021). Discovering New Drugs In “Traditional” Chinese Medicine.
- Putri, G. D. W. I., Negara, J. A., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). Analisis Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Rahmatullah, R., Djafar, M., & Insani, N. (2024). Memutus Rantai Kemiskinan : Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis. 8(2), 92–98.
- Rimaldo, M. F., Pekanbaru, A. K., Riau, P., Studi, P., Perpolisian, P., & Pamong, T. (2024). Penertiban gelandangan dan pengemis oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru provinsi riau.
- Rohmawati, I., Komunikasi, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., Diri, K., & Calhoun, M. (2024). Konsep Diri Pengemis dan Sikap Mengemis Demi Keberlangsungan Hidup antara lain : dan merugikan , sehingga diatur dalam adalah pilihan sikap men
- Yendrita, S. N. (2022). Garuda - Garba Rujukan Digital.